

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merokok merupakan hal biasa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, menurut dr Kartono Mohamad selaku Ketua *Tobacco Control Support Center* Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) Sebanyak 63% laki-laki dewasa di Indonesia adalah perokok. Tentunya angka yang cukup besar jika dilihat dari persentasenya. Setiap orang tentunya berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dari bahaya asap rokok. Karena itu, salah satu upaya efektif untuk melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok orang lain adalah melalui penerapan kawasan tanpa rokok (KTR). (dinkes.inhub.go.id)

Pemerintah melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Rokok Tembakau Bagi Kesehatan telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di wilayahnya masing-masing melalui peraturan Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan perundang-undangan daerah lainnya. KTR ini meliputi:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat anak bermain
4. Tempat ibadah
5. Angkuan umum
6. Tempat kerja

7. Tempat umum dan tempatlainnya yang ditetapkan.

KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, DPR/DPRD, maupun pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang dari bahaya asap rokok. Lebih dari 7.000 bahan kimia telah teridentifikasi pada asap rokok, 250 senyawa tersebut adalah racun dan karsinogenik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersamadari lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat ini akan sangat berpengaruh pada penerapan KTR.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan pemerintah Desa mempunyai peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah berkewenangan mengurus urusan rumah tangga daerah sendiri (Desentralisasi). Perananan dapat juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (Norma-norma, larangan dan tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat tugas untuk menghubungkan membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi. (T. Coser dan Rosenbreg dalam Mika Miranda Monalisa Momuat)

Desa singkil adalah sebuah Desa di Wilayah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Desa Singkil secara Geografis berada di Wilayah Ponorogo bagian selatan yang berbatasan dengan sebelah utara Desa Jalen Barat Desa Gombang dan sebelah timur berbatasan

dengan Desa Karang. Desa singkil terbagi menjadi 4 (empat) dusun yaitu Dusun Jothaan, Dusun Sekedung, Dusun Krajan dan Dusun Nglongop yang masing-masing di pimpin oleh kepala dusun. Sedangkan lokasi kantor desa berada di Dusun Krajan. Jumlah penduduk di Desa Singkil yaitu 2.089 Jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.036 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1.053 jiwa.

Desa Singkil yang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Singkil bahwa merokok merupakan kebiasaan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu Asap rokok juga berbahaya bagi kesehatan perokok pasif maupun perokok aktif itu sendiri. Pemerintah Desa Singkil pun membuat Perdes (Peraturan Desa) No. 5 tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Menurut Kepala Desa Singkil Bapak Arifien Mujahiddin dibuatnya Peraturan Desa ini karena keluhan dari para ibu-ibu desa singkil yang terganggu karena setiap acara banyak warga yang merokok, dan juga pengeluaran untuk membeli rokok lebih besar dari pengeluaran lainnya. Peraturan Desa Singkil No.5 tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Desa Singkil, merupakan Desa pertama di Kabupaten Ponorogo yang membuat Peraturan Desa Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK (Studi Tentang Implementasi Peraturan Desa No. 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan darilatar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus dari penelitian yang akan di ambil adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja yang menjadi factor penghambat dan pendukung dari Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan utama dari penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Singkil Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Desa Singkil Balong Ponorogo.

2. Mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Desa Singkil Balong Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Setiap diadakannya suatu penelitian tentunya mempunyai manfaat dari penelitian tersebut. Dengan diadakannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapapihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Untuk membandingkan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Selain itu penelitian ini merupakan wahana untuk melatih dan mengembangkan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh selama di bangku kuliah.

2. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan khususnya tentang peraturan desa kawasan tanpa rokok.

3. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan kesadaran bagi masyarakat Desa Singkil

khususnya untuk lebih berperan aktif dalam Implementasi Kebijakan kawasan tanpa asap rokok.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini untuk mempermudah pemahaman konsep penelitian maka ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan. (Nugroho, 2003).

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut Nugroho yaitu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat dua macam langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk proram-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2003)

3. Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan

memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. (dinkes.inhukab.go.id)

F. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dalam arti luas dibagi menjadi dua yaitu kebijakan peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yang disebut sebagai konvensi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tertinggi dibuat oleh legislatif dan ini berarti mengikuti prinsip dasar dari Teori Politik *Trias Politica* yang diajarkan oleh Montesquieu pada abad pencerahan di perancis abad 17. Formulasi Kebijakan atau perundangan adalah Legislatif dan eksekutif yang melaksanakan sedangkan yudikatif mengadili jika eksekutif maupun legislatif melakukan pelanggaran (Nugroho, 2003).

Robert Eystone memberikan definisi tentang kebijakan public yaitu menyatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat artikan sebagai “Pemerintah yang mempunyai Hubungan dengan lingkungannya”. Thomas R.Dye mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan”. Richard Rose mengemukakan bahwa Kebijakan publik seharusnya dipahami sebagai “ Suatu kegiatan yang memiliki hubungan bagi dan konsekuensi di dalamnya”.

Menurut (Keban, 2004) “*Public Policy*” dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai suatu kerangka kerja”. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan.
- b. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
- c. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai tujuannya,
- d. Kebijakan merupakan program kerja yang harus disusun cara pengimplementasiannya dan kelompok sasaran dari tujuan kebijakan.

Dari berbagai definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan para ahli, pandangan yang dikemukakan James Anderson dianggap cukup tepat yaitu mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan dengan hal ini, aktor-aktor bukan pemerintah/swasta tentunya dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik.

Pendapat lain mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Chief J.O Udoji dalam Sholichin Abdul Wahab. Udoji mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A sabatier (1983) dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat lima tahapan yaitu :

- a. Disusunnya kebijakan dari lembaga pelaksana
- b. Kepatuhan target untuk mematuhi output kebijakan
- c. Hasil nyata output kebijakan
- d. Penerimaan hasil nyata output kebijakan
- e. Revisi atas kebijakan yang dibuat.

Implementasi Kebijakan Publik melalui badan-badan pemerintah dilakukan oleh negara. Karena implementasi kebijakan salah satu tugas pokok dari pemerintah. Menurut George C Edwards ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik :

- a. Komunikasi

Dalam rencana untuk mencapai keberhasilan dari implementasi kebijakan para pelaksana atau tim implementor haru mengetahui apa yang yang menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan dalam proses

implementasinya. Selain itu, tim implementor juga harus menjelaskan tujuan dari kebijakan kepada masyarakat atau kelompok sasaran kebijakan. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media cetak maupun elektronik.

b. Sumber daya

Tim Implementor dan sumber daya manusia juga berperan sebagai faktor penentu keberhasilan dari Implementasi Kebijakan Publik. Apabila sumber daya manusia yang menjadi faktor utama penentu keberhasilan tidak mencukupi maka proses implementasi kebijakan tidak akan berjalan maksimal. Adanya tim implementor kebijakan Publik merupakan salah satu bentuk dari sumber daya yang memadai.

c. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu penentu keberhasilan dari implementasi kebijakan. Yang dimaksud disposisi yaitu Tim Implementor kebijakan Publik harus memiliki karakter yang baik dan sikap jujur sehingga dapat menjadi panutan masyarakat atau kelompok sasaran kebijakan. Dalam implementasi kebijakan disposisi juga merupakan faktor penentu keberhasilan. Dalam implementasi kebijakan banyak sekali yang tidak berhasil dalam implementasinya

karena tim implementor tidak memiliki karakter disposisi yang baik .(suharno, 2013:169)

d. Struktur birokrasi

Dalam pengimplementasian kebijakan Struktur birokrasi juga merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Dalam pengimplementasian kebijakan perlu dibuat SOP (*Standar Operational Procedure*). SOP dalam implementasi kebijakan dibutuhkan agar proses implementasi kebijakan lebih teratur dan terarah karena sudah ada tahapan-tahapan dalam proses implementasi kebijakan. Selain itu disusunnya SOP untuk menghindari proses Implementasi kebijakan yang terlalu panjang.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan Edwards tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, Marilee S. Gridle dalam bukunya *Politics and policy implementation inthe world* menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan (context of implementation).

Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang didalamnya memuat kepentingan kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada

kebijakan yang tidak memuat kepentingan kelompok sasaran

2. Suatu kebijakan yang diimplementasikan akan menerima manfaat bagi kelompok sasaran, apabila sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan fisik, seperti membangun jembatan atau jalan raya akan lebih mudah diimplementasikan daripada kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah implementor kebijakan tersebut sudah tepat diserahkan kesebuah institusi.
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci. Dalam hal ini instansi-instansi yang terkait untuk sebagai implementor kebijakan ini diperlukan selain untuk memudahkan implementor untuk melakukan koordinasi, juga untuk memudahkan pengawasan oleh publik.
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi. Sumber daya yang dimaksud

dapat berupa sumber daya finansial maupun kompetensi dari implementor.

Ruang lingkup dalam implementasi Kebijakan yaitu :

1. Dilihat dari strategi, kepentingan dan kekuasaan yang para aktor miliki dalam implementasi kebijakan.
2. Rezim yang berkuasa dan karakteristiknya
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam bukunya yang berjudul *Implementation of public policy*, variabel lingkungan, karakteristik kebijakan, karakteristik masalah merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Masalah Karakteristik meliputi beberapa faktor sebagai berikut:

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah untuk dipecahkan, seperti kekurangan persediaan makanan dan air bersih di daerah bencana. Dipihak lain ada masalah-masalah sosial yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga relatif untuk dipecahkan, seperti kemiskinan, korupsi pengangguran dan sebagainya. Oleh karena itu karakteristik masalah tu sendiri mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang diimplementasikan.

2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Artinya, suatu program akan relatif mudah untuk diimplementasikan pada kelompok sasaran yang relatif homogen. Sebaliknya, untuk kelompok sasaran yang relatif heterogen, implementasi kebijakan juga akan sulit. Dengan kata lain semakin heterogen sebuah kelompok sasaran, maka tingkat kesulitan implementasi kebijakan juga relatif meningkat.
3. Dalam pengimplementasian kebijakan jumlah kelompok masyarakat sangat berpengaruh semakin sedikit jumlah masyarakatnya maka akan semakin mudah dalam implementasi kebijakan. Namun apabila jumlah kelompok masyarakat lebih besar dari tim implementornya maka proses implementasi akan berjalan sedikit lambat.
4. Maksud dan tujuan kebijakan yang berisi untuk memberi pengetahuan kepada kelompok masyarakat. Atau kelompok sasaran tujuan implementasi kebijakan akan lebih mudah diterima apabila memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dari pada memiliki tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat.

Karakteristik Kebijakan (*ability of statue to structure implementation*) mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Dalam pengimplementasian kebijakan kejelasan isi kebijakan sangat mempengaruhi proses implementasi. Semakin jelas isi kebijakan maka akan semakin mudah proses implementasinya. Namun apabila sebaliknya tim implementor akan kesulitan dalam memahami isi, serta arah tujuan kebijakan.
2. Kebijakan yang didalamnya terdapat unsur-unsur teori akan lebih mudah pengimplemntasiannya karna memiliki dasar yang jelas.
3. Faktor keuangan dalam proses implementasi kebijakan juga mempengaruhi proses keberhasilan implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun dalam tahapan implementasi kebijakan akan membutuhkan biaya operasional.
4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana. Setiap institusi yang terkait dengan implementasi kebijakan harus melakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Distorsi terhadap implementasi kebijakan dapat terjadi jika komitmen implementor terhadap rendah. Ada banyak contoh yang dapat kita pakai, misalnya

bagaimana sebuah implementasi kebijakan menjadi kacau karena perilaku korup implementor.

7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Sebuah kebijakan yang memungkinkan banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi akan lebih mendapat dukungan dari pada kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya.

Menurut Donald S. van Meter dan Carl E. Van Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan implementasi kebijakan yang gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi atau para pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Kurangnya sumber daya

akan menyulitkan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3. Hubungan antarorganisasi

Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung implementasi kebijakan. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*Implementors*). Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

4. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, pola yang terjadi dalam lingkungan birokrasi serta norma-norma. Dalam implementasi kebijakan kedua faktor tersebut sangat berpengaruh dalam pengimplementasiannya. Organisasi informal maupun organisasi formal merupakan fokus

perhatian para agen pelaksana dalam implementasi kebijakan.

Ciri dari agen pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan karena para agen pelaksana diharuskan menjadi tim implementor kebijakan yang disiplin dan ketat dalam tugasnya. Selain itu diperlukan juga agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor atau sikap para pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006) Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan

persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a. Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan
- c. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

3. Kawasan Tanpa Asap Rokok

Menurut pedoman pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok yang dikeluarkan oleh Kementerian kesehatan Republik Indonesia. Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar oleh asap rokok. Kawasan tanpa rokok bertujuan untuk

menurunkan angka kesakitan atau kematian akibat asap rokok dengan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

Berjalannya Peraturan Desa tentang kawasan tanpa asap rokok dengan baik dapat kita lihat dari ciri-ciri pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap rokok itu sendiri, yaitu tidak adanya masyarakat yang merokok di kawasan tanpa asap rokok adanya pengawasan dan sanksi bagi masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Adanya pengawasan dan sanksi yang dikenakan terhadap masyarakat yang melanggar aturan Kawasan Tanpa Asap Rokok kemudian adanya pemantauan terhadap pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok kemudian adanya pemantauan terhadap pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Asap Rokok tersebut. Dengan adanya hal semacam ini, maka pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta mencerminkan perilaku dan kinerja pemerintah yang benar-benar mementingkan masyarakat.

4. Peraturan Desa Singkil No. 05 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Desa Singkil tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Singkil guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari dibuatnya Peraturan Desa Tentang

Kawasan Tanpa Rokok ini yaitu menambah kesadaran serta pengetahuan tentang hidup sehat serta menjelaskan bahayanya merokok bagi kesehatan individu maupun orang lain.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, untuk memberi kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian diperlukan suatu operasional yang dimaksud untuk menjelaskan indikator-indikator yang ditetapkan. Definisi operasional adalah unsur yang mengukur suatu variabel atau petunjuk pelaksanaan suatu penelitian. Variabel ialah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai.

Definisi operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat dilihat melalui indikator yang ada. Adapun indikator penelitian ini adalah :

1. Sosialisasi peraturan Desa Singkil tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok
 - a. Sosialisasi Langsung
 - b. Sosialisasi Tidak Langsung
2. Pelaksanaan Peraturan Desa Singkil tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok
 - a. Larangan melakukan aktifitas merokok
 - b. Pembentukan personil pelaksana Peraturan Desa Singkil Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

- c. Peningkatan disposisi pelaksana Peraturan Desa Singkil tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
 - d. Pemberian sanksi.
3. Faktor pendukung Implementasi Peraturan Desa Singkil Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
 - a. Keadaan sosial dan budaya masyarakat
 4. Keterlibatan masyarakat
 - a. Pelaporan Pelanggaran Peraturan Desa.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data. Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna (sugiyono,2013)

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih Desa Singkil karena di Kabupaten Ponorogo baru Desa Singkil yang mempunyai Peraturan Desa tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

3. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih spesifik..

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data. Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna (sugiyono,2013).

Purposive Sampling merupakan cara yang digunakan peneliti dalam menentukan informan. *Purposive Sampling* yaitu dalam menentukan informan peneliti tidak memilih secara acak. Namun menentukan siapa saja informan yang dapat memberikan informasi sejelas-sejelasnya dan mendalam.

Dalam pengumpulan data dan informasi informan yang dipilih peneliti untuk dapat memberikan informasi terkait judul penelitian yaitu adalah para Aparat Pemerintah Desa Singkil, Tim penggerak implementasi Peraturan Desa, Bidan Puskesmas Desa Singkil, dan beberapa masyarakat Desa Singkil. Informan yang dipilih oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi dan data terkait tentang Implementasi Peraturan Desa Singkil Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok yang menjadi judul penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian metode pengumpulan data merupakan faktor terpenting agar data yang didapatkan menjadi lebih akurat. Dalam pengumpulan data, data yang harus diperoleh peneliti yaitu data-data berupa informasi terkait judul penelitian

dan juga data-data pendukung seperti foto dokumentasi. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksudkan, penelitian dapat menggunakan berbagai macam metode. Di antaranya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. (sugiyono, 2013).

Bila responden yang akan diwawancarai telah ditentukan orangnya, maka sebaiknya sebelum melakukan wawancara. Pewawancara minta waktu terlebih dahulu kapan dan dimana bisa melakukan wawancara. Dengan cara ini, maka suasana wawancara akan lebih baik sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dan valid.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi atau teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek penelitian

yang lain. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamati lebih dalam hal-hal terkait Implementasi Peraturan Desa Singkil Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foti atau karya tulis akademik atau seni yang telah ada.(Bogdan dalam sugiyono, 2013)

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi mengambil data di lokasi-lokasi yang merupakan Kawasan Tanpa Asap Rokok. Sebagai bahan penguat data penelitian, peneliti menggunakan Dokumentasi yang sudah diperoleh selama tahap pengumpulan data.

5. Teknis Analisis Data

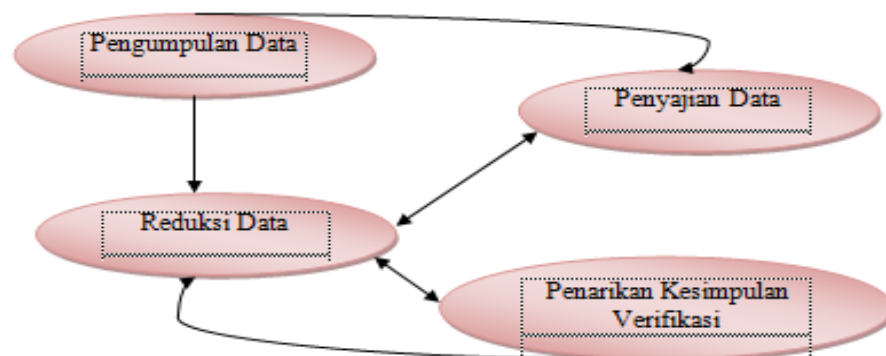
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan padasaat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah

melakukan analisis terhadap jawaban hasil wawancara apabila setelah dianalisis peneliti belum mendapat hasil maksimal maka peneliti dapat melakukan wawancara kembali sampai memperoleh hasil maksimal. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif.

Aktivitas dalam analisis data ada 3 yaitu : 1.) Reduksi Data; 2.) Penyajian Data; 3.) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. (Miles dan Huberman dalam sugiyono, 2013).

Gambar 1.1

Gambar Model Miles dan Huberman



Dalam gambar diatas menjelaskan bahwa peneliti harus siap dalam proses pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan atau verifikasi. Analisis ini merupakan suatu proses yang terus berlanjut proses keempatnya berlangsung selama kegiatan pengambilan data berlangsung. Saat data yang diperoleh telah siap untuk dikerjaksn maka proses tersebut pun berhenti .

Berikut ini merupakan Interaktif Miles dan Huberman :

a. Tahap Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam analisis data interaktif yaitu mengumpulkan data berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap dan perilaku keseharian yang peneliti peroleh melalui observasi dengan menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera dan video tape. Proses pengumpulan data di awal harus melibatkan informan, aktivitas atau konteks terjadinya peristiwa.

b. Tahap Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak dan kompleks. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu apabila peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.

c. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyajian data ini memudahkan peneliti terkait apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Karena dalam melakukan analisis data peneliti memperdalam dan memfokuskan pada temuan yang terdapat dalam analisisnya.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti

yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

